

# **TESIS**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

***THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON COMMUNITY  
WELFARE IN SOUTH SULAWESI PROVINCE***

**SATRIO ANGGA MURTI**

**A032202006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **TESIS**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

***THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON COMMUNITY  
WELFARE IN SOUTH SULAWESI PROVINCE***

**SATRIO ANGGA MURTI**

**A032202006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**TESIS**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**SATRIO ANGGA MURTI**  
**A032202006**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi  
Program Magister, Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

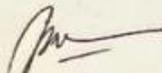
pada tanggal **16 Januari 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

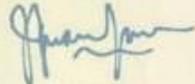
Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Paulus Uppun, SE., MA**  
NIP. 19561231 198503 1 015

  
**Dr. Nur Dwiana Sari Saudi SE., M.Si., CWM®**  
NIP. 19770119 200801 2 008

Ketua Program Studi Magister  
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,

  
**Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE, MA, CWM®**  
NIP. 19651012 199903 2 001

  
**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si**  
NIP. 19840205 198810 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satrio Angga Murti  
NIM : A032202006  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan ”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Satrio Angga Murti

## PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan shalawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan”**.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari paradoks ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis bermaksud menyumbangkan konsep untuk menyikapi permasalahan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada bapak Dr. Paulus Uppun SE.,MA sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Dwiana Sari Saudi SE.,M.SI.,CWM® sebagai pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program magister, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir SE.,M.Si.,CIPM. Beserta para wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada ibu Dr. Indraswati Tri Abdireviane SE.,MA., CWM® selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin dan kepada seluruh anggota tim penguji: Bapak Dr. Sabir,.SE.,M.Si,CWM®, Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE.,M.Si dan Bapak Dr. Hamrullah SE.,M.Si yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan saran dan kritik yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini.

Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pascasarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik. Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman EPP angkatan 2020 yang telah membantu penulis semasa perkuliahan dan seluruh teman geng cafeteria yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala canda dan tawa semangat yang kalian berikan

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Munir Hatiin. serta Ibunda Hj. Marhaeti yang dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Serta kakak dan adikku atas segala doa, pengorbanan, kesabaran dan perhatiannya dalam kebersamaan keluarga, sejak awal dan sampai saat terakhir penulis menempuh pendidikan Program Magister.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dalam khasanah pengembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya akademik ini, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala aktifitas dan amal usaha kita. Amiin.

Makassar, 25 Januari 2023



Satrio Angga Murti

## ABSTRAK

SATRIO ANGGA MURTI. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan*( dibimbing oleh Paulus Uppun dan Dwiana Sari Saudi )

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Peneliti menggunakan data panel 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2016-2021. Metode analisis data yang digunakan untuk model penelitian ini model regresi data panel *Ordinary least Square* (OLS) yang di bantu oleh aplikasi E-views 12. Hasil penelitian ini menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. belanja modal tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan, Belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat



## ABSTRACT

SATRIO ANGGA MURTI . *The Effect of Fiscal Decentralization on Community Welfare in South Sulawesi Province* ( Guided by Paulus Uppun and Dwiana Sari Saudi )

This study aims to see the effect of fiscal decentralization and capital spending on people's welfare both directly and indirectly through economic growth. Researchers used panel data from 24 districts/cities in South Sulawesi Province for the 2016-2021 period. The data analysis method used for this research model is the ordinary least square (OSL) panel data regression model assisted with E-views 12 application. The results of this study indicate that fiscal decentralization has a positive and significant effect on economic growth. Capital expenditure has a negative and significant effect on economic growth, fiscal decentralization has a positive and significant effect on community welfare. Capital expenditure is not significant to the community welfare. Economic growth has a negative and significant effect on community welfare. Fiscal decentralization on community welfare through economic growth has a significant effect, capital expenditure on community welfare through economic growth has no significant effect

Keywords : Fiscal Decentralization, Capital Expenditures, Economic Growth, Community Welfare



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Studi.....	12
1.4 Manfaat Studi.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Desentralisasi Fiskal .....	13
2.1.2 Belanja Modal .....	21
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.2 Hubungan Antar variabel .....	28
2.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	28
2.2.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	29
2.2.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	30
2.2.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	31
2.2.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	33
2.3 Tinjauan Empiris.....	35
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	<b>42</b>
3.1 Kerangka Konsep.....	42
3.2 Hipotesis .....	44

<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Pendekatan Penelitian.....	45
4.2 Lokasi dan Waktu penelitian .....	45
4.3 Jenis dan Sumber Data .....	45
4.4 Metode Pengumpulan Data .....	46
4.5 Metode Analisis Data.....	46
4.6 Definisi Operasional Variabel .....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan .....	53
5.2 Deskripsi Data .....	54
5.2.1 Keadaan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021.....	54
5.2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021.....	55
5.2.3 Keadaan Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021.....	56
5.2.4 Keadaan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021.....	57
5.3 Analisa Hasil Penelitian .....	59
5.4 Pembahasan .....	62
5.4.1 Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	62
5.4.2 Pengaruh Langsung Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	64
5.4.3 Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	66
5.4.4 Pengaruh Langsung Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	67
5.4.5 Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	68
5.4.6 Pengaruh Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	70
5.4.7 Pengaruh Tidak Langsung Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	70
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
6.1 Kesimpulan .....	72
6.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR GAMBAR

1.1	IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan .....	.3
3.1	Kerangka konseptual Penelitian .....	43

## DAFTAR TABEL

2.1	Klasifikasi IPM.....	27
5.5	Hasil Estimasi Fungsi Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah diuntut berperan penting, strategis dan utama dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan negara saat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, program pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijaksanaan program dan penganggaran yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung mendorong kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *trickle down effect*.

Aspek pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam menentukan kemajuan dari suatu daerah (Dianaputra dan Aswitari, 2017). Mirza (2011) menyatakan bahwa IPM merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kualitas hidup manusia yang diukur melalui kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi (daya beli). Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Rustariyuni, 2014). Tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Karenanya, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkannya, maka seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga serta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta jajarannya diharapkan bersungguhsungguh merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada asas manfaat . Dalam mewujudkan pembangunan yang stabil dan berkesinambungan, tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup manusia demi memajukan kesejahteraan masyarakat ( Wahyudin, Salim A & Suhab S, 2015)

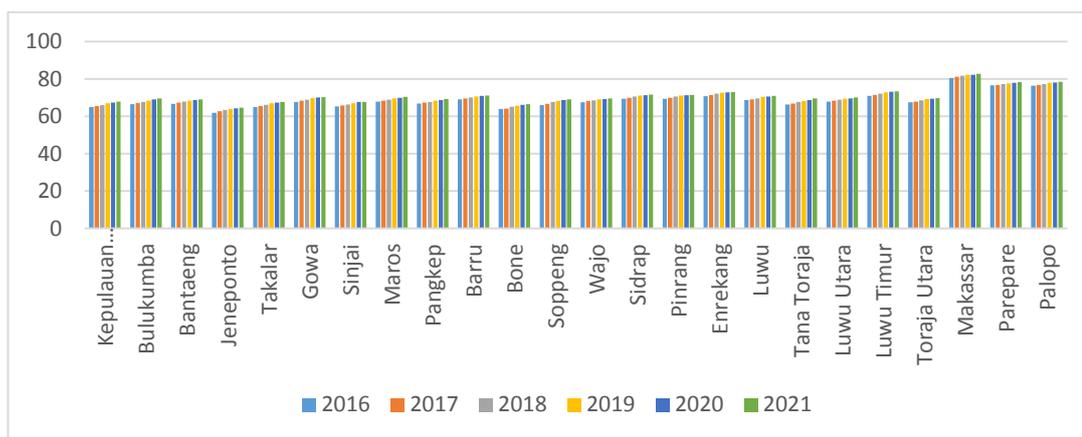
Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, terdapat beberapa indikator yang umum digunakan, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan modal manusia berdasarkan tiga aspek pembentuk IPM. Semakin tinggi IPM merepresentasikan pembangunan modal manusia yang semakin baik.

Nilai IPM Sulawesi Selatan masih berada dibawah rata-rata nasional dan belum sesuai dengan target RPJMD. Berdasarkan data publikasi, meskipun sejak tahun 2016 sampai 2021 nilai IPM Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan, namun peningkatan ini belum signifikan dalam meningkatkan posisi IPM Sulawesi Selatan secara Nasional. IPM Sulawesi Selatan Pada tahun 2021 sebesar 72,24 yang menempatkan Sulawesi Selatan berada diperingkat 16 di antara 34 provinsi. Peringkat ini tentunya belum sesuai target yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan periode 2018-2023 yang mencanangkan masuk dalam kategori 10 besar nasional. Rendahnya nilai IPM Sulawesi Selatan dibanding nasional justru terjadi pada saat Sulawesi Selatan mencapai

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi atas pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal menurut (Brata, 2002), kinerja ekonomi yang baik mendukung pembangunan manusia dan sebaliknya pembangunan manusia yang berkualitas mendukung pembangunan ekonomi.

Gambar 1.1

IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2021

Berdasarkan gambar 1.1 Menunjukkan capaian pembangunan manusia Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan cukup bervariasi. Pada periode 2016-2021 Daerah yang mencapai IPM tertinggi adalah Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-Pare. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mudah dan terjangkau. Sedangkan daerah yang mencapai IPM terendah selama periode 2016-2021 adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Dan Kabupaten Takalar. Jika di klasifikan dalam kategori tinggi rendahnya IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2016-2021 hanya 7 kabupaten/kota yang berada dalam kategori tinggi dan 17 kabupaten kategori sedang

Sulawesi Selatan memiliki potensi penduduk dan wilayah yang sangat kaya. Namun, potensi yang dimiliki ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan ketimpangan antarwilayah. Luas wilayah dan belum meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi. Baik antar perkotaan dan perdesaan, antar kabupaten dan antar Kota dengan kabupaten. Disparitas antar kabupaten/kota terlihat dari capaian IPM tertinggi untuk Kota Makassar dan IPM terendah Kabupaten Jeneponto. Pada tahun 2021 selisih capaian IPM kedua Kabupaten/kota tersebut mencapai selisih 18.10 poin. Mencermati fakta ini langkah strategis yang diambil Indonesia, mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan dengan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui Desentralisasi Fiskal ini diharapkan IPM yang tinggi secara efisien dan efektif.

Selama beberapa dekade terakhir, transfer kewenangan dan sumber daya fiskal ke pemerintah daerah telah terjadi di banyak negara. Ketika Negara-negara mendesentralisasikan kewenangan dan sumber daya keuangan ke tingkat pemerintahan daerah, pemahaman tentang berbagai efek dari kebijakan desentralisasi fiskal menjadi sangat penting (Yang z, 2016). Desentralisasi fiskal di anggap sebagai bagian dari paket reformasi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, untuk mempromosikan persaingan di antara pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk memfasilitasi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Lin, 1992; Davoodi dan Zou, 1998). Pembahasan desentralisasi fiskal mendapat perhatian yang cukup signifikan. Banyak penelitian yang secara empiris berfokus pada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejak desentralisasi fiskal mulai di teliti, istilah dan metode penelitian yang berbeda telah di perkenalkan dan hasil yang berbeda telah diperoleh. Beberapa ahli ekonomi menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Oates 1972; Lin dan Liu 2000; Akai dan Sakata 2002; Jin dkk 2005), sedangkan yang lain percaya memiliki efek penghambatan (Zhang dan Zou, 1998; Davoodi dan Zou 1998; Xie dkk 1999; Enikolopov dan Zhuravskaya, 2007).

Tujuan awal dan mendasar desentralisasi fiskal untuk meningkatkan penyampaian barang dan jasa di ruang publik yang dapat dicapai melalui transfer kewenangan dan sumber daya keuangan ke tingkat pemerintah daerah. Banyak penelitian menguji dampak desentralisasi terhadap pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan antar pribadi, pembentukan modal sosial, dan sebagainya, tetapi mereka cenderung salah sasaran, yaitu menentukan apakah desentralisasi mengarah pada penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, dan sebagai konsekuensi nya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Diaz-Serrano, Luis and Rodríguez-Pose, 2014). Oleh karena itu, langkah penting yang sering di abaikan oleh sebagian besar studi tentang implikasi ekonomi dari desentralisasi fiskal adalah membahas efek kesejahteraan dari desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal diikuti konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merujuk prinsip uang mengikuti fungsi (*Money Follow Function*), artinya setiap bentuk penyerahan kewenangan yang mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Bentuk perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara

proporsional dan demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi kondisi dan kebutuhan daerah (UU No 33 Tahun 2004).

Rosemary, et al., (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Setiap usaha pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusreni dan suhab, 2009). Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta swasta harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta swasta dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di daerah harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan (Yasa dan Arka, 2015). Tujuan akhir dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk (Rimbawan, 2012). Banyak upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan di daerahnya yang diharapkan dapat memberi pengaruh positif untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pelaksanaan pembangunan

sebagai bentuk dari desentralisasi merupakan upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk meraih tujuannya (Wijayanti dan Darsana, 2015).

Zhouhaier, (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika pemerintah daerah diberikan otonomi daerah. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu sumber- sumber penerimaan bagi daerah dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing (Santosa, 2013).

Terwujudnya desentralisasi fiskal dapat memicu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Ikeji, 2011). Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa melalui desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa mengalami perubahan yang lebih baik. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh (Malik dkk, 2006) bahwa desentralisasi fiskal merupakan strategi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. (Pose, 2007) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberi perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan.

Pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal oleh pemerintah diharapkan bisa mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Menurut (Halim, 2007) belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah, belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas penunjang pelayanan publik. Peningkatan alokasi belanja modal dalam wujud aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk menunjang produktivitas perekonomian karena jika belanja modal tinggi maka produktivitas perekonomian semakin meningkat (Novita, 2012).

PAD yang merupakan penerimaan daerah diharapkan bisa menaikkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk membiayai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik dapat maksimal (Putra dan Ulupui, 2015). Belanja modal digunakan untuk pembuatan aset tetap publik yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, yang ditujukan untuk layanan publik dan petugas. Dalam hal ini, belanja modal yang digunakan untuk layanan publik akan lebih produktif daripada belanja modal yang digunakan untuk aparatur daerah (Triyanto dkk, 2017).

Tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu mengeluarkan belanja pemerintah dengan efektif untuk menopang aktivitas perekonomian seperti pembangunan sarana prasarana publik, selain itu dengan tepatnya mengalokasikan belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga dapat mengalami peningkatan (Kusuma, 2016). Belanja modal hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melaksanakan aktivitas pembangunan (Yovita, 2011). Modebe dkk, (2012), juga berpendapat bahwa adanya infrastruktur berkualitas maka produktivitas juga akan meningkat. Belanja modal yang meningkat diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih baik karena aset tetap daerah yang meningkat merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah hasil dari pengeluaran belanja modal.

Meningkatnya PAD dan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya pengelolaan dana di daerah masing-masing maka sangat diperlukan penggunaan dana tersebut secara optimal sehingga bisa

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.

Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan terbaru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maksud dari penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terdiri empat pilar utama, yaitu :mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui TKD transfer keuangan daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan dana transfer pusat ke daerah sehingga perlu pengelolaan keuangan daerah secara profesional terbuka dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas serta *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis) sebagai langkah terwujudnya akuntabilitas publik.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memicu meningkatnya pembangunan ekonomi daerah. (Arsyad, 2004) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dapat di pahami bahwa sasaran fundamental pembangunan ekonomi daerah yang berusaha hendak dicapai oleh banyak daerah adalah salah satunya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Prud'homme (1995), Peterson (1996), Zang dan Zao (1995) dalam penelitiannya di Amerika Serikat, Phillips dan Woller (1997) dan Davodi dan Zao (1998) untuk kasus di negara maju, Ang dan Zao (2001) dalam penelitiannya di India, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandjaja dkk, (2020) Sujipto, suci, dan umbara (2019), Wahyudiana (2017), Kharisma (2013) dan Miyasto (2013).

Kendatipun perdebatan dan manfaat dari desentralisasi fiskal di Indonesia masih terus berlangsung yang cenderung ambigu membawa kita pada sejumlah pertanyaan. Sudah tepatkah proses desentralisasi di Indonesia? Apakah kita sudah *on the right track*? Kini timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia akan memberi manfaat seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, diidentifikasi hasil yang berbeda-beda dari setiap peneliti atau belum konsisten. Atas dasar hal ini peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali dengan tujuan untuk menguji dan Menganalisis Pengaruh

Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?

## **1.3 Tujuan Studi**

Berdasarkan Rumusan masalah, tujuan studi yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Berdasarkan segi teori sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

2. Berdasarkan sebagai praktik, sebagai sumbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengetahui pengelolaan keuangan daerah yang benar yang memenuhi prinsip *good governance* dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai sumbangan bagi DPRD kabupaten/kota untuk mengetahui wewenang legislasi dalam menggunakan, mengawasi, dan mengendalikan alokasi APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sumbangan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah.
3. Sebagai sumbangan referensi bagi peneliti berikutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Bird dan Vaillancourt, 1998). Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Menurut Pujiati (2008), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik

sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih, 2003).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dampaknya terhadap perekonomian dapat dijelaskan dengan kerangka teori *fiscal federalism*. Terdapat dua perspektif teori dalam *fiscal federalism* yaitu *traditional theories* dan *new perspective theories*. *Traditional theories* pertama dipelopori oleh Samuelson (1954-1955) yang meneliti tentang sifat asli dari barang publik, Musgrave (1959) tentang peran keuangan publik dalam intervensi pemerintah, dan Arrow dan Lind (1970) mengenai peran sektor publik dan swasta. Sementara itu, *new perspective theories* dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972).

*Traditional theories* menekankan dua hal mengenai keuntungan desentralisasi. Pertama, pengetahuan di masyarakat (*knowledge in society*). Hayek (1945) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan lebih efisien dari sisi ketersediaan informasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah biasanya memiliki pengetahuan lebih baik tentang daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait penyediaan barang dan jasa dengan lebih efisien, atau dikenal dengan istilah efisiensi alokasi.

Kedua, dimensi persaingan antar pemerintah daerah dari sisi alokasi belanja publik. Tiebout (1956) menjelaskan bahwa adanya persaingan antar pemerintah daerah dalam alokasi belanja publik dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi tersebut tidak akan terjadi jika penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah pusat secara seragam. Oleh karena itu,

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan publik sesuai preferensi dan kebutuhan masyarakat melalui sumber pendanaan sendiri (self-financing).

*new perspective theories* yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran (*revenue dan expenditure assignment*) antar tingkat pemerintahan. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan desentralisasi fiskal. Apabila peran pemerintah pusat dibatasi dalam mengelola pelaksanaan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola perekonomian daerah. Dalam upaya menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah dan kemakmuran ekonomi daerah, teori generasi kedua ini menekankan pada dua mekanisme yaitu interaksi vertikal antar tingkat pemerintahan pusat dan interaksi horizontal antar pemerintah daerah (Darmawan, 2014).

Terdapat tiga pendekatan sebagai dasar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana dinyatakan oleh Litvack dan Seddon (1998), yaitu (i) pendekatan penerimaan, (ii) pendekatan pengeluaran, (iii) pendekatan komprehensif. Pertama, pendekatan penerimaan (*revenue approach*) mempunyai arti bahwa pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan di daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dan pemerintah daerah mendapatkan proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah. Selain itu, dalam upaya mengatasi kesenjangan potensi penerimaan antardaerah,

pemerintah pusat dapat pula memberikan transfer dana yang bersifat umum dan khusus sebagai sumber penerimaan daerah.

Kedua, pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) diartikan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pengeluaran daerah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari sumber penerimaan selain penerimaan asli daerah (penerimaan yang dihasilkan sendiri). Penerimaan tersebut dapat berupa pinjaman, hibah (*grant*), atau bagi hasil (*revenue sharing*). Pendekatan pengeluaran ini sangat erat kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan seluruh sumber penerimaan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menyusun rencana pembiayaan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan transparan dan akuntabel.

Ketiga, pendekatan komprehensif dilakukan dengan cara menyelaraskan potensi penerimaan dengan besarnya kebutuhan pengeluaran (*expenditure needs*). Melalui pendekatan komprehensif, kewenangan di bidang penerimaan dan pengeluaran diserahkan kepada daerah secara bersamaan. Apabila terjadi ketimpangan antara potensi penerimaan dan besarnya tanggung jawab pengeluaran yang didelegasikan, maka pemerintah pusat akan menutupnya dengan hibah atau pinjaman

Dalam berbagai literatur terkadang desentralisasi juga diartikan sebagai suatu konsep, suatu proses, suatu teori, suatu metodologi dan suatu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakadilan pembangunan sosio-ekonomi pada suatu wilayah. Desentralisasi selain dipahami sebagai suatu kebijakan untuk mendistribusikan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah, desentralisasi juga sebagai cara untuk memperpendek rentang kendali yang pada akhirnya memudahkan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah, sesuai dengan karakteristik daerah, lebih menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah serta diyakini lebih efektif dan efisien dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi suatu wilayah.

Dalam berbagai konsep tersebut perlu ditekankan satu poin bahwa varian definisi yang tercakup dalam tipe-tipe desentralisasi tersebut tidak semata menyoal pergeseran dan pengalihan kekuasaan atas urusan antar level pemerintah namun juga mencakup otoritas non-negara baik berupa partisipasi warga (desentralisasi demokratik/politik) maupun keterlibatan dan kemitraan dengan swasta (desentralisasi pasar/ekonomi) (Jaweng, 2014).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri masih berfokus pada desentralisasi disisi pengeluaran, sehingga pemberian kewenangan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah relatif terbatas, namun kepada daerah diberikan kewenangan yang cukup leluasa untuk mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Sebagian besar dana yang ditransfer dari pusat ke daerah bersifat *block grant* atau dapat digunakan secara bebas oleh setiap daerah dan sepenuhnya pertanggungjawaban berada di level daerah, yaitu kepada dewan perwakilan rakyat daerah. Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, kepada daerah juga diberikan transfer yang bersifat *specific grant* yang penggunaannya diarahkan oleh pemerintah pusat, antara lain melalui dana alokasi khusus, sehingga program pemerintah pusat dan daerah dapat terjaga keterkaitannya.

Untuk menjaga pertanggungjawaban penggunaan dana publik, maka pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah mengacu pada pola pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam paket undang-undang keuangan negara. Kebijakan transfer ke daerah dimaksudkan antara lain untuk: Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah ataupun ketimpangan fiskal antardaerah. Menyesuaikan kebutuhan pendanaan di setiap daerah sesuai pembagian urusan pemerintahannya. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di setiap daerah serta mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah. Meningkatkan kemampuan setiap daerah dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah. Mendukung dan menjaga kesinambungan fiskal secara nasional. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya. Meningkatkan kesesuaian antara rencana pembangunan di tingkat nasional dengan rencana pembangunan di tingkat daerah.

Selain hal tersebut di atas, manfaat lain dari dana transfer adalah untuk mengendalikan seluruh pengeluaran pemerintah daerah, untuk mendorong mobilisasi penerimaan, dan mendukung tanggung jawab dan transparansi pengambilan keputusan di daerah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi disparitas antar wilayah melalui dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara ideal, seharusnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dibiayai dari PAD sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Namun demikian, selama lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia peran PAD menjadi semakin menurun. Menurunnya peranan PAD

terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peran transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Kebijakan DAU mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antardaerah (*horizontal imbalance*). Dengan demikian, diharapkan dengan DAU ini dapat menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah untuk membiayai penyediaan barang publik. Dengan kata lain, bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai peranan yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan adanya transfer dana dari pusat ke daerah melalui konsep fiskal gap yaitu kebutuhan daerah atau *fiscal needs* dibandingkan dengan potensi daerah atau *fiscal capacities*, dimana kebutuhan daerah yang lebih besar dibandingkan kapasitas fiskalnya, akan ditutup oleh transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, transfer dana melalui Dana Alokasi Umum akan dapat mengoreksi kesenjangan antardaerah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Penyempurnaan Undang-Undang HKPD UU No 1 Tahun 2022, pada dasarnya ditekankan pada empat pilar yaitu (1) ketimpangan Vertikal dan horisontal, (2) Penguatan *Local Taxing Power*, (3) Peningkatan kualitas Belanja Daerah dan (4) Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah. Melalui kebijakan dana bagi hasil SDA diharapkan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumberdaya alam yang dimilikinya. Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat-daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu

pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus serta merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas secara nasional, selain itu juga untuk mengurangi *interjurisdictional spillovers*. DAK ini terutama dibatasi untuk membiayai investasi kapital fisik, dan untuk meningkatkan penyediaan barang publik di daerah. Dari sisi peningkatan pemerataan pendapatan, maka peranan DAK sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran, secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi.

Pengeluaran rutin digunakan untuk menjaga agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan, misal pembayaran gaji, barang dan jasa yang mendukung aktivitas rutin, biaya pemeliharaan, transportasi, dan akomodasi. Sedangkan pengeluaran investasi digunakan untuk aktivitas investasi, misal pengadaan gedung baru, jalan tol, jembatan, jalan raya, saluran irigasi, dan lain-lain. Perbedaan utama dalam pengeluaran pemerintah daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal bukan hanya pada kontribusi pengeluaran itu sendiri, akan tetapi hal yang penting adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dananya sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebelum adanya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengontrol secara penuh dan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap dana transfer tersebut. Akan tetapi, setelah adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah mempunyai otoritas penuh untuk mengelola dana mereka, sehingga anggaran akan dialokasikan untuk pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

### **2.1.2 Belanja Modal**

Menurut Halim (2007) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Menurut Erlina & Rasdianto (2013), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/201. Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi apabila kegiatan ekonomi negara tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Atau dengan kata

lain, pertumbuhannya terjadi jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian disuatu negara bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013). Schumpeter dalam Boediono (2012) juga menyatakan bahwa pertumbuhan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyak faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara rasional. Menurut ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999). Secara umum Harijono (2013) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan tenaga kerja. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara terdiri dari 3 hal, yaitu: (1) Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. (2) Sumber daya manusia merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, atau dengan kata lain jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. (3)

Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Namun, apabila jumlah penduduk semakin meningkat maka peningkatannya ini akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Sehingga akan menurunkan tingkat kesejahteraan serta tingkat kemakmuran masyarakat. Kemudian pada keadaan ini, pendapatan para pekerja hanya mencapai tingkat *subsistence*. Dengan arti lain bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka produksi marginal akan mengalami penurunan. Oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2012).

Kaum klasik berpendapat bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis menjadikan perekonomian berjalan dengan efisien. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan jumlah penduduk yang akan memperluas dan mendorong spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja semakin bertambah. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah mengalami penurunan dan perekonomian menjadi stagnan.

Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Hal ini berarti terjadinya kenaikan jumlah penduduk berarti permintaan juga akan bertambah. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kenaikan kapital untuk investasi, dimana kapital tersebut didapat dari tabungan. Tapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif yang disebabkan

oleh pertumbuhan penduduk yang menekan upah. Oleh karena itu Maltus menjadi pesimis dengan perkembangan ekonomi.

Menurut Neo klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada bertambahnya penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal tetap digunakan sepenuhnya dari masa ke masa.

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya, dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat. Menurut Harrod-Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh (*steady growth*). Semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa semakin banyak. Jadi, berdasarkan teori ini ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang (*steady growth*).

Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang harus dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

#### 2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen dalam Pressman (2000), kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Indikator kesejahteraan masyarakat yang hanya didasarkan pada PDB merupakan cara pandang yang terlalu sederhana dalam memahami kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan model yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam PDB sehingga menjadi *purchasing power adjusted real* PDB. Formulasi PDB per kapita dengan memperhitungkan daya beli mengakibatkan PDB suatu wilayah menjadi lebih obyektif jika dibandingkan dengan PDB wilayah lain, namun tetap saja bahwa transformasi indikator PDB per kapita berdasarkan daya beli tetaplah dianggap subyektif karena ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sangat ekonomi dan kuantitatif. Hal

inilah yang kemudian memunculkan ukuran-ukuran yang baru mengenai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

Teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu relokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. *New contractarian approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

#### **2.1.4.1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting.

Sejak kali pertama merilis IPM pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Penghitungan IPM yang dilakukan di Indonesia mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Ketika UNDP melakukan perubahan dan penyempurnaan metode penghitungan IPM, Indonesia juga turut mengadopsi metode tersebut dengan mengacu pada penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Penghitungan yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini mengadopsi metodologi yang direvisi UNDP pada tahun 2014.

Dalam upaya untuk membandingkan antarwilayah, dibentuklah klasifikasi IPM. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang Sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

**Tabel 2.1 Klasifikasi capaian IPM**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Capaian IPM</b>
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

**Sumber: BPS 2021**

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori umum yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah *decentralization theorem* yang dikembangkan oleh Oates (1972). Oates menyebutkan bahwa efisiensi ekonomi secara mendasar dapat ditingkatkan melalui delegasi dalam bentuk desentralisasi fiskal kepada pemerintah level terendah, sehingga mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun tingkat regional. Pemahaman yang sama juga diterangkan oleh Tiebout (1956) yang menyebutkan bahwa terdapat dua gagasan fundamental ekonomi dibalik desentralisasi fiskal yaitu, (1) melalui desentralisasi, efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan karena pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan (2) kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik dan mobilitas penduduk antar pemerintah daerah akan terjadi dalam rangka untuk menyesuaikan dan mencocokkan antara preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah.

Menurut Martinez dan McNab (2003) bahwa ada keterikatan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat multidimensional baik berupa *direct* maupun *indirect* sehingga sulit untuk menentukan hubungan yang optimal. Lebih lanjut lagi World Bank (1997) ada tiga kemungkinan kondisi yang terjadi akibat keterikatan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yakni: pertama, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi akibat pengeluaran pemerintah lebih efisien; kedua, desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan instabilitas makro

ekonomi; ketiga, desentralisasi fiskal dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal

Dari beberapa temuan empiris kejelasan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi masih kurang meyakinkan. Beberapa studi menemukan korelasi hubungan positif seperti; studi dari Akai dan Sakata (2002). Jin dan Zou (2005), Felstentein dan Iwata (2005), Rustan (2013), Anita (2014) Disisi lain terdapat studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Seperti studi dari Davoodi dan Zou (1998), Zhang dan Zhou (1998), Rodriguez-pose dan Kroijer (2009), Khamdana (2016)

## **2.2.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan**

### **Masyarakat**

Lindahman dan Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* untuk melihat *basic needs*. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Hasil penelitian dari Saputra dan Mahmudi (2012) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Kusreni dan Suhab, 2009) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan positif searah dengan IPM. Hubungan positif searah tersebut mengindikasikan sumber-sumber pendapatan daerah dari PAD serta bagi hasil pajak dan bukan pajak (SDA). Belum atau tidak bersifat distorsi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh sebab itu, semakin tinggi angka rasio belanja modal dalam struktur APBD, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sugiyanta, 2016; Yuliastati, 2017)

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi suatu negara dibentuk dari tiga unsur yaitu sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia dan akumulasi modal yang dimiliki (Arsyad, 2010). Menurut Harrod-Domar faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan modal, pembentukan modal dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan (Arsyad, 2010). Belanja modal adalah salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yaitu keduanya bisa diamati dari meningkatkan pelayanan publik yang merupakan tujuan utama otonomi daerah.

Belanja pemerintah merupakan salah satu instrument strategis dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah juga bagian dari kebijakan fiskal, yaitu untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercermin dari dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya belanja modal dialokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik. Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula harapan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Beberapa penelitian menemukan bahwa hubungan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016), Bahasoan (2017), dan Tampubolon (2019). Hubungan pengaruh positif ini menjelaskan jika belanja modal naik maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Modal dasar melakukan aktifitas ekonomi yaitu sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi, maka dari itu untuk pembangunan infrastruktur ekonomi yang optimal yaitu dengan pengalokasian anggaran belanja yang tepat sasaran.

#### **2.2.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang mencerminkan pengeluaran dalam bentuk pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Dengan ini perlu ada kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah

daerah. Melalui belanja modal ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah itu sendiri dan menjadi daerah yang mandiri agar infrastruktur baik jalan maupun yang lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (Bado, 2016).

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila pemerintah dan swasta bermitra dalam berbagai sektor secara bereksinambungan. Proses transmisi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni pemerintah di dorong untuk meningkatkan alokasi belanja modal APBD setiap tahun nya. Melalui alokasi belanja modal pada APBD tersebut, pemerintah daerah berusaha secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan yang di implementasikan setiap tahunnya. Melalui pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya pembangunan diharapkan dapat mendatangkan investasi swasta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan terbuka kesempatan kerja serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hasil studi menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat seperti yang diteliti oleh Kusreni dan Suhab (2009), Mirza (2011), Setyowati dan Suparwati (2012). Ini berarti bahwa jika angka IPM yang tinggi sebagai wujud dari meningkatkannya kesejahteraan masyarakat dapat dipicu dengan belanja modal.

## 2.2.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan

### Masyarakat

Tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, yang berarti implementasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, menurut Boediono (2009), stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogeti oleh keanikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi kualitas manusia pada pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui model pertumbuhan Solow. Menurut Todaro, et al., (2006), berdasarkan model Neoklasik Solow dapat kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari tiga faktor, yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan dan kesehatan; penambahan modal melalui tabungan yang diinvestasikan; dan penyempurnaan teknologi. Model ini kemudian dilanjutkan oleh teori pertumbuhan baru (*new growth theories*) dimana teknologi yang di anggap sebagai variabel eksogen pada model Solow dijadikan sebagai variabel endogen dengan menyertakan penekanan investasi komplementer dalam sumberdaya manusia melalui pendidikan, pembelajaran, riset dan pengembangan. Adapun kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia terjadi karena pertumbuhan ekonomi akan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan pembangunan manusia.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat kemudian juga didukung dengan hipotesis "*trickle down effect*" (dampak merembes ke bawah) yang melekat pada "*growth paradigm*" yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia), Kuncoro (2010). Bhalla (1994) membawa perspektif lain yang menghubungkan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong oleh sektor swasta. Menurut Kuncoro (2010) walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan hipotesis "*trickle down effect*" terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatiannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia).

Dalam perspektif makroekonomi hubungan tersebut dijelaskan oleh Mankiw (2007) dengan menyatakan bahwa, "Dalam jangka panjang, kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya." Mankiw menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi terbaik adalah PDB. PDB riil mengukur output barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki

hampir segalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil, lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet. Berbeda dengan hipotesis “*trickle down effect*”, Barro (1991) menemukan hubungan sebab akibat antara tingkat kematian bayi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan teori “*human capital*”. Dengan menyusun hubungan tersebut, Barro (1991) menolak hipotesis “*trickle down effect*” yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti hasil penelitian dari Yasa dan Arka (2015), Bahasoan (2019), Tampubolon (2019). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia menjelaskan bahwa kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah (Mirza, 2006).

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Dalam kajian empiris ini akan dijelaskan studi terdahulu yang berkaitan dengan studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Bahasoan (2021), melakukan penelitian tentang *Effect of General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditure on Economic Growth in West Sulawesi Province Period 2015 – 2018*. Hasil dari penelitian ini menemukan

hubungan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.

Nantharhat dkk (2020), melakukan penelitian yang berjudul desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Thailand: Analisis lintas wilayah. Pengolahan data di penelitian ini menggunakan regresi *Panel Fully Modified Least Squares* (FMOLS) dan *Panel Dynamic Least Squares* (DOLS), penelitian ini menemukan bukti empiris efek positif dari desentralisasi pendapatan, ketergantungan transfer, dan ketidakseimbangan fiskal vertikal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di lima wilayah. Namun, studi ini juga menemukan bahwa desentralisasi pengeluaran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi tingkat signifikansinya lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pesat anggaran belanja pemerintah kota metropolitan setelah tahun-tahun transisi politik pada tahun 2006 dan 2014 telah menyebabkan stagnasi dalam investasi publik di tingkat lokal di seluruh negeri, sehingga mengakibatkan tertinggalnya output industri dan produk provinsi bruto. Kurangnya pengeluaran anggaran juga melemahkan permintaan dan menghambat pertumbuhan di bidang manufaktur, konstruksi, dan kegiatan real estat, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan kesenjangan pembangunan dalam perekonomian Thailand.

Guandong Ma dan Jie Mao (2018), melakukan penelitian tentang *Fiscal Decentralization and Local Economic Growth: Evidence from a Fiscal Reform in China*. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tergantung pada kualitas pemerintahan dan lebih menonjol di daerah dengan pemerintahan yang berkualitas tinggi. Hasil tersebut mengkonfirmasi pandangan yang mengatakan bahwa desentralisasi

fiskal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, namun tidak menjamin bahwa kebijakan pro bisnis akan disertai dengan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat.

Zahari, M, Tan, S., Haryadi, H., & Syaparuddin, S. (2018), melakukan penelitian tentang *Analysis of fiscal decentralization impact on community welfare in Jambi Province*. Penelitian ini menggunakan data panel, gabungan data time series tahun 2010-2016 dan cross section 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Metode analisis data adalah analisis deskriptif dan pendekatan analisis regresi data panel yaitu fixed effect model (FEM). Pengujian hipotesis menggunakan statistik uji F dan uji statistik t. Hasil penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wahyudiana (2017), melakukan penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, dan pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan. Hasil dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Kalimantan. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan

Waryanto (2017), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat

seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketidak konsistenan hasil penelitian di berbagai negara, masih sulitnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, masih rendahnya rasio belanja modal terhadap PDB. Dengan menggunakan data time series selama 26 tahun mulai 1990 s.d. 2015 di Indonesia, penelitian ini telah membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini telah mempertimbangkan variabel kontrol berupa inflasi. Berkaitan dengan hasil penelitian, pemerintah pusat hendaknya terus memperhatikan belanja modal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja modal.

Yushkov (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan desentralisasi Fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Rusia. Hasil dari penelitian ini adalah belanja Interregional pada desentralisasi berpengaruh negative dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, ketergantungan region terhadap transfer pemerintah pusat positif dan signifikan terhadap pertumbuhan. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah di Region Rusia terlalu berlebihan pada desentralisasi yang menyebabkan adanya hubungan negative antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi.

Kharisma (2013), melakukan penelitian yang berjudul Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Menemukan bahwa Hasil studi mengenai pengaruh peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi dapat

disimpulkan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan dan memobilisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang ada.

Hal ini disebabkan karena besarnya peran atau dominasi Pemerintah Pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan, termasuk dalam mengatur dan mengendalikan anggaran Pemerintah Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Kedua, memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, pengaruh anggaran peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran tersebut jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.

Miyasto (2013), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan (studi kasus : kabupaten/kota di Jawa Tengah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) data panel. Penelitian ini menemukan bahwa Pengaruh desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan berpengaruh secara signifikan dan positif. Jadi, desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Estimasi model regresi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bahwa mempunyai hubungan yang positif dan

signifikan terhadap desentralisasi fiskal dan tenaga kerja. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar juga, hal tersebut dipengaruhi adanya nilai PAD yang semakin besar terhadap total penerimaan daerah. Sedangkan peningkatan tenaga kerja akan menambahkan output dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yahya I (2012) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang bertanda positif berarti memiliki hubungan yang searah yang artinya setiap penambahan atau kenaikan sebesar 1 (satuan) desentralisasi fiskal akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,082%.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang bertanda negatif berarti memiliki hubungan yang searah menurun yang artinya setiap penambahan atau kenaikan sebesar Rp.1 milyar belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara sebesar 0,002%.

Badrudin (2012), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaen/kota di provinsi jawa tengah. Menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008.

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **3.1 Kerangka Konsep**

Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan APBD yang berkualitas setiap tahun nya. APBD Kabupaten/Kota merupakan gambaran keseriusan pemerintah daerah untuk mengkonkritkan perannya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang menjadi kewenangannya untuk dibiayai dalam satu tahun berjalan.

Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititik beratkan pada diskresi untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

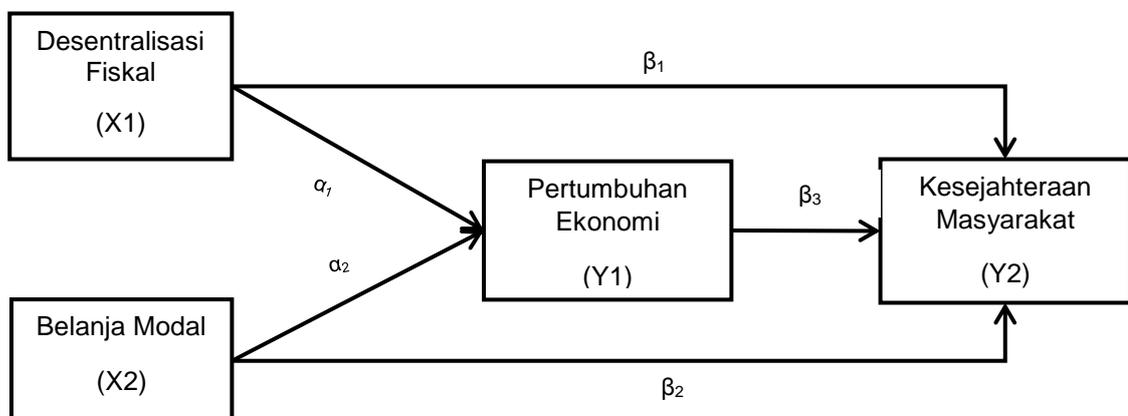
Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi suatu negara dibentuk dari tiga unsur yaitu sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia dan akumulasi modal yang dimiliki Arsyad (2010). Melalui alokasi belanja modal pada APBD tersebut, pemerintah daerah berusaha secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan yang di implementasikan setiap tahunnya. Melalui pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya. Pembangunan diharapkan dapat mendatangkan investasi swasta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan terbuka kesempatan kerja serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Belanja modal salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta terdapat pengaruh positif antar belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, (Putra, 2016). Dan terdapat pengaruh positif belanja modal dengan kesejahteraan masyarakat (Setyowati dan suparwati, 2012)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan kesejahteraan dalam pendapatan masyarakat mulai meningkat. Dengan pertumbuhan ekonomi meningkat diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Yasa dan Arka, 2015).

Berdasarkan teori serta beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dijelaskan maka, penelitian ini menghasilkan sebuah kerangka konsep. Adapun kerangka penelitian dalam kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Kerangka konseptual penelitian**



### 3.2 Hipotesis

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teori, dan Studi Sebelumnya seperti yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Diduga desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan
4. Diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan
5. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan
6. Diduga desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan
7. Diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan